

BIROKRASI DALAM SOROTAN, BIROKRASI KKN.....!?!?!?



Dunia birokrasi memang unik. Mungkin karena keunikannya, maka birokrasi ini dapat bertahan dalam situasi apapun. Dalam keadaan stabil, khaos, perang atau bahkan dalam keadaan hancurnya suatu Negara sekalipun, kecuali kiamat. Lantas apa sebenarnya yang menjadi keunikan birokrasi, termasuk kemampuannya untuk bertahan dalam segala situasi?

Birokrasi adalah sebuah tipe organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen

dalam skala besar. Batasan ini merupakan batasan yang diramu dari teori dan konsep sebagaimana banyak dikembangkan oleh para ahli administrasi, organisasi, dan manajemen. Dalam batasan ini, sebenarnya birokrasi memiliki makna yang luas dimana ia adalah merupakan salah satu tipe organisasi, kemudian ada proses administrasi dan manajemen yang dilakukan dalam upaya mengoperasionalisikannya, dan berada pada lingkup organisasi yang berskala besar. Paling tidak, itulah pandangan yang dikemukakan oleh para pengkaji birokrasi seperti: Weber (dalam terjemahannya oleh Henderson dan Parsons, 1947); Gifford & Pinchot (1993), Blau dan Meyer (2000).

Pada awal perkembangannya, birokrasi bagaikan “dewa penyelamat” yang sangat dinantikan kedatangannya untuk menyelamatkan “dunia” dari praktek-praktek penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan organisasi, penindasan terhadap buruh, dan eksploitasi manusia oleh para pemilik modal atau kekayaan yang terjadi di dunia Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat.

Studi tentang Birokrasi, pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber pada akhir abad 19 dalam bukunya “*The theory Social Of Economic Organization*” yang diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris oleh Henderson dan Talcott Parsons pada tahun 1947. Dalam bukunya tersebut Weber mengemukakan mengenai tipe dan cirri-ciri birokrasi yang ideal seperti: 1) *A hierarchial chain of command*; 2) *Specialization by function*; 3) *Uniform policies covering rights and duties*; 4) *Standardized procedures for each job*; 5) *A carrier based on promotions for technical competence*; 6) *Impersonal realtions* (Gifford & Pinchot 1993:23). Sejak itulah perkembangan dan implementasi teori birokrasi mulai berkembang dan digunakan oleh hamper setiap organisasi besar termasuk pemerintahan. Apa yang terjadi dengan perkembangan birokrasi ini, ternyata melebihi ramalan dari Webernya sendiri. Ia meramalkan bahwa birokrasi ini akan berkembang dalam 100 tahun ke depan, tapi yang terjadi justru lebih cepat dari yang diperkirakan, yakni kurang dari 50 tahun perkembangan birokrasi, baik secara keilmuan yang dikaji oleh para akademisi, maupun praktek-praktek teori

birokrasi oleh kalangan praktisi, baik perusahaan, militer, maupun pemerintahan, bahkan organisasi-organisasi nirlaba.

Meskipun pada awal perkembangannya birokrasi ini bersifat umum, artinya birokrasi adalah sebuah tipe organisasi, tapi seiring dengan perkembangannya pulalah maka birokrasi mengalami penyempitan makna (dilihat dari lingkup organisasi), yakni dipandang sebagai organisasi pemerintah dengan sistemnya yang berbelit-belit. Inilah barangkali yang menjadi titik awal munculnya “keunikan” dalam birokrasi. Unik karena sejak adanya stigma “negative” terhadap birokrasi, posisi birokrasi tetap “dicari” dan diminati, sekaligus tetap dicaci dan “dimaki”, tidak terkecuali di Indonesia saat ini.

Apa gerangan yang terjadi dengan birokrasi di Indonesia? Banyak peristiwa yang melibatkan birokrasi dalam berbagai kejadian, khususnya yang terkait dengan masalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, yang diselesaikan dengan tidak selesai. Hal-hal inilah yang antara lain menyebabkan begitu buruknya perilaku birokrasi di Indonesia. Sebut saja diantaranya adalah kasus cicak-buaya yang melibatkan para aparat hukum, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana pada saat itu dianggap terjadi rekayasa hukum oleh pihak kepolisian terhadap KPK, yang pada akhirnya diselesaikan dengan cara “tidak diselesaikan”. Kemudian muncul kasus *bailout Century gate* yang diindikasikan merugikan Negara sekitar Rp 6,7 Triliun, yang juga “diselesaikan” dengan tidak selesai.

Selanjutnya hampir berturut-turut, kasus demi kasus terus bermunculan. Gayus Tambunan, seorang PNS Direktorat Pajak, berpangkat golongan III/a dengan masa kerja baru 5 tahun, “berhasil” memiliki kekayaan sampai ratusan milyar rupiah. Kasus Kemenpora, Kemendiknas, Kemenkes dengan Nazaruddin (ketika masih menjadi anggota DPR dan Sekjen Demokrat), kasus Kemenakertrans, dan entah kasus apalagi nanti yang akan menyusul kemudian??? Mafia hukum, mafia anggaran, mafia beacukai, mafia pelabuhan, dan mafia-mafia lainnya nampaknya begitu mewarnai negeri ini, dan secara khusus di dalamnya ada keterlibatan birokrasi kita. Itu adalah beberapa diantara kasus yang memberikan kontribusi terhadap *image* birokrasi khususnya.

Dalam lingkup tatanan/system yang diterapkannya, birokrasi seringkali disorot dengan ketidakprofesionalannya dalam pelayanan, berbelit-belit, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), semuanya seolah-olah sudah begitu lekat dengan stigma birokrasi. Publik mencaci tapi juga public mencari. Berbondong-bondong ingin menjadi PNS, dengan menempuh berbagai cara, termasuk menyogok demi untuk diterima menjadi PNS. Di pihak lain, Birokrasi terus dituntut untuk senantiasa memperbaiki kinerjanya di tengah-tengah terpaan masalah yang menyelimutinya. Uniknya, tak ada yang menuntut dibubarkannya birokrasi. Ya....inilah birokrasi, tetap dibutuhkan, dan entah sampai kapan pula peran dan fungsinya tak akan pernah pudar, paling tidak selama sebuah pemerintahan dan Negara ada.

Permasalahan yang menyelimuti birokrasi sebenarnya tidaklah berdiri sendiri. Artinya, apa yang terjadi dalam birokrasi’ khususnya yang terkait dengan KKN maupun kinerja pelayanannya merupakan suatu rangkaian dampak dan implikasi dari ketidakberesan system lainnya di luar birokrasi itu sendiri. Tanpa bermaksud memberikan pembenaran atas keadaan birokrasi selama ini, tapi itulah faktanya. **Intervensi politik** terhadap birokrasi bukanlah rahasia lagi. Memperbaiki birokrasi

tidak dapat dilakukan secara parsial hanya di lingkungan birokrasi saja, melainkan semua aspek dan lingkungannya pun harus diperbaiki. Meminjam istilah pilarnya *good governance*, maka yang harus diperbaiki adalah semuanya, pemerintahannya, pengusahanya, dan masyarakat atau *public* itu sendiri, termasuk kalangan media massanya, LSM-nya, dan parpolnya. Hegemoni “public” yang begitu kuat karena dibangun dan dikembangkan dengan dalih “Demokrasi”, justru menjadi katalisator bagi kelompok tertentu untuk ikut “menikmati” kondisi birokrasi. Ya...mutualisme lah...begitu kira-kira...!!!???

Apa yang terjadi dalam kasus Nazarudin, Gayus Tambunan, *Centurygate*, BLBI, dan kasus-kasus lainnya, di pusat maupun daerah, semuanya ada keterkaitan dengan pihak-pihak tersebut. Namun sayangnya, semuanya tidak pernah diungkap secara tuntas, dan hanya berhenti pada pihak-pihak yang dijadikan “bemper” sebagai korban terakhirnya, sementara otak pelaku dan lingkungannya yang lebih besar dan berpengaruh, tidak pernah disentuh. Karena itulah, maka tidak heran apabila masalahnya tidak pernah selesai, karena akarnya tidak dibersihkan, sehingga “tumor” korupsi ini sudah menjalar akut kepada seluruh anatomi vital di Negara ini. Akhirnya, Birokrasilah yang tetap menjadi SOROTAN. BIROKRASI KKN...!!!??? (**Riyadi**)

Sumber gambar : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZIHTR5j_ywPX1_TRZJIQB7eu82UmDPF87rb5eU7Os4H8xEH7